

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

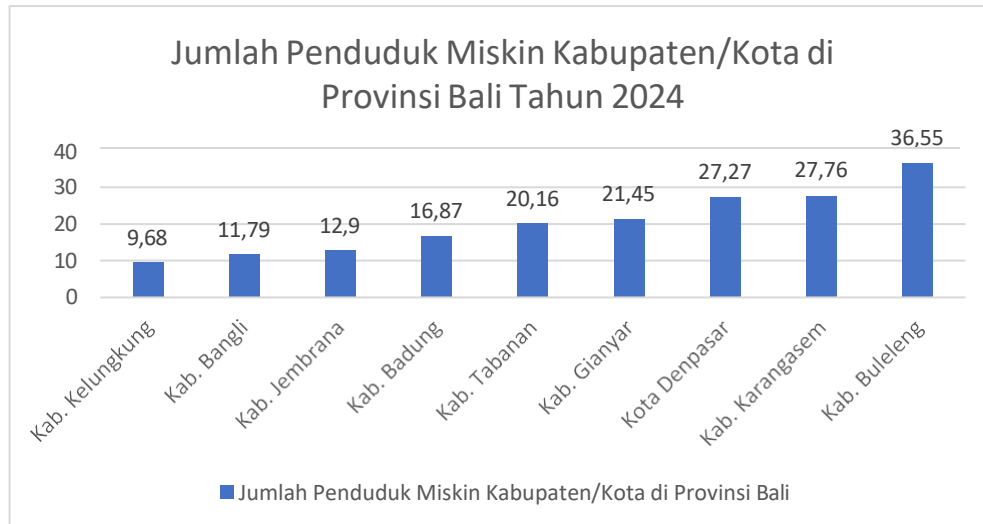
Indonesia, sebagai negara yang berbasis laut, secara natural sangat terhubung dengan area perairan yang luas. Dengan wilayah maritim yang sangat besar, Indonesia dikenal sebagai pulau terbesar di dunia. Lautan Indonesia mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), perairan teritorial, dan daerah lain yang berada di bawah kendali Indonesia. Secara keseluruhan, luas wilayah daratan Indonesia melebihi 5,8 juta kilometer persegi (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2024). Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang perikanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan mereka dari sektor maritim. Sektor perikanan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga nelayan.

Pembangunan selalu menjadi permasalahan yang paling krusial bagi berbagai pihak dan masyarakat secara keseluruhan, karena dianggap sebagai jalan menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Alexandro & Irwansyah, 2020). Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkat kesejahteraan keluarga yang semakin baik mencerminkan kualitas hidup yang lebih (Sriyono dkk., 2021). Karakteristik kehidupan masyarakat nelayan berbeda dari masyarakat pada umumnya karena pola hidup mereka berkembang dari aktivitas kelautan. Aktivitas tersebut mengandung tingkat risiko yang tinggi, khususnya risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor alam (Rahim, 2018).

Kabupaten Buleleng terletak di sepanjang pantai utara Bali dan memiliki panjang garis pantai mencapai 157,05 km. Ukuran panjang garis pantai ini menggambarkan potensi besar Kabupaten Buleleng dalam hal sumber daya laut dan perikanan. Area pesisir yang luas memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghasilan utama, terutama dalam bidang perikanan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Buleleng mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,64 persen, dengan produk domestik bruto (PDB) regional mencapai 24,83 triliun rupiah. Kenaikan PDB ini terutama berasal dari peningkatan produksi di beberapa sektor ekonomi tertentu. Di tahun 2024, kontribusi sebesar 20,90% berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDB Kabupaten Buleleng, turun dari 21,54 persen pada tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh laju kenaikan harga yang lebih lambat untuk sektor-sektor ini dibandingkan dengan produk lainnya.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat pesisir seperti nelayan. Pada tahun 2024, Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali, dengan 184.430 orang, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Jumlah penduduk miskin antar kabupaten/kota di provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut.



Sumber: Data BPS (2024)

Gambar 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki masyarakat miskin tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain yang ada di Provinsi Bali. Situasi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara potensi ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk. Data kesejahteraan sosial terpadu untuk Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa Kecamatan Gerokgak memiliki proporsi penduduk berpenghasilan rendah tertinggi. Untuk memberikan gambaran perbandingan angka-angka ini antar kecamatan, data disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Buleleng 2024

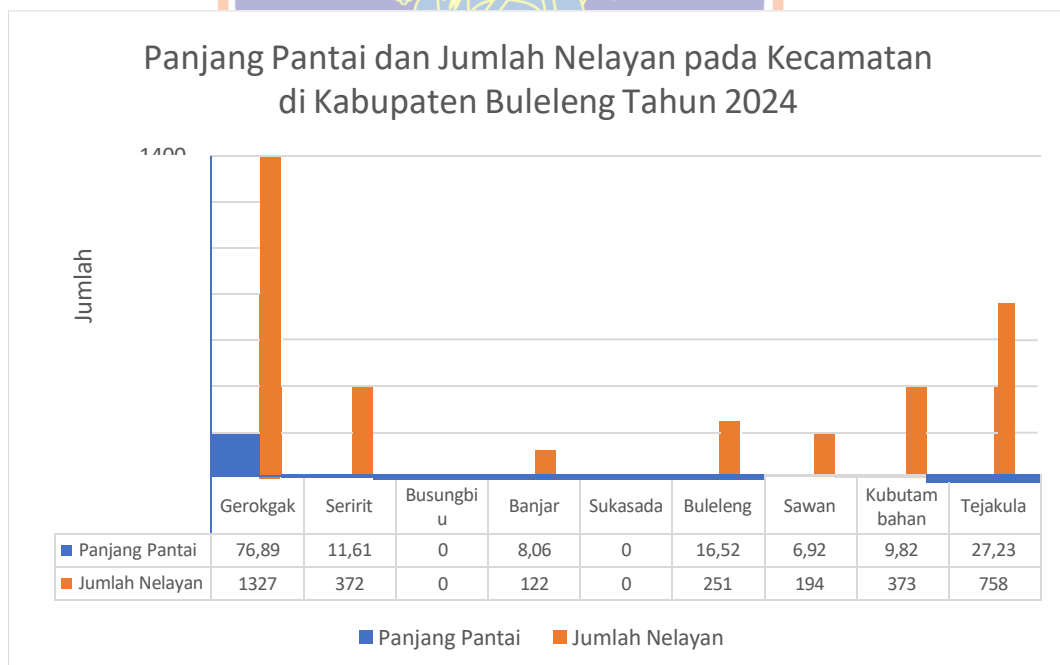
No	Kecamatan	Jumlah Jiwa	Jumlah Keluarga
1	Gerokgak	31.138	10.295
2	Seririt	25.314	8.812
3	Busungbiu	12.551	4.228
4	Banjar	22.862	8.062
5	Sukasada	29.128	6.397
6	Buleleng	21.958	7.822
7	Sawan	15.804	5.350
8	Kubutambahan	19.144	6.231
9	Tejakula	16.936	5.960

Total	18.936	63.157
--------------	---------------	---------------

Sumber: *Website Satu Data Buleleng*

Dapat dilihat bahwa pada Tabel 1.1, menjelaskan bahwa Kecamatan Gerokgak memiliki jumlah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah paling tinggi di Kabupaten Buleleng, yaitu sebanyak 31.138 jiwa dengan 10.295 keluarga. Angka ini lebih tinggi daripada di kecamatan lain, menunjukkan bahwa penduduk kecamatan Gerokgak masih memiliki tingkat kesejahteraan relatif rendah.

Sebaliknya, Kecamatan Gerokgak memiliki garis pantai terpanjang dengan panjang 76,89 km, yang menunjukkan potensi sumber daya laut yang sangat besar. Penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan di Kecamatan Gerokgak terbanyak di Kabupaten Buleleng mencapai 1.327 jiwa orang. Potensi panjang pantai didukung jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Buleleng sebagai nelayan sesuai Gambar 1.2.



Sumber: Data BPS (2024)

Gambar 1. 2
Panjang Pantai dan Jumlah Nelayan

Para nelayan di Kecamatan Gerokgak biasanya nelayan tradisional yang bergantung pada alam dan menggunakan alat tangkap sederhana. Sebagian besar nelayan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dan pengalaman kerja yang diperoleh secara turun-temurun. Aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara mandiri maupun dalam kelompok kecil, dengan hasil tangkapan yang sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi cuaca. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan nelayan cenderung tidak stabil.

Dengan garis pantai yang panjang dan populasi nelayan yang besar, Kecamatan Gerokgak memiliki potensi yang sangat besar dalam industri maritim dan perikanan. Potensi ini harus dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kenyataannya, kontribusi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kemiskinan dikalangan nelayan menjadi sebuah pertanyaan besar (Arimawan & Suwendra, 2022). Situasi ini menunjukkan perbedaan antara kesejahteraan masyarakat nelayan dan potensi sumber daya laut yang ada. Meskipun memiliki sumber daya yang melimpah, sebagian besar nelayan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti pendapatan yang rendah dan tidak stabil, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi. Melalui penelitian ini, terlebih dahulu diidentifikasi faktor yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan.

Kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat tidak bersifat sama, melainkan berbeda-beda dan memiliki tingkatan yang beragam. Perbedaan tersebut mencakup kondisi sosial ekonomi pada tingkat rendah, sedang, hingga tinggi, sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi sosial yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat (Sudiarta dkk., 2021). Adapun gambaran

situasi sosial dan ekonomi nelayan di masyarakat nelayan di Kecamatan Gerokgak sebagai berikut.

Tabel 1. 2
Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Gerokgak
Tahun 2025

Nama Desa	Jumlah Nelayan	Rata-Rata Pendapatan Nelayan Perbulan	Tingkat Pendidikan	Rata-Rata Pengeluaran Pangan Perbulan	Rata-Rata Pengeluaran Non-Pangan Perbulan
Sumber Klampok	68	Rp. 1.500.000	SD/SLTP/ SMA	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
Pejarakan	187	Rp. 1.300.000	SD/ SEDERAJAT	Rp. 700.000	Rp. 600.000
Sumberkima	241	Rp. 2.000.000	SD/ SEDERAJAT	Rp. 1.200.000	Rp. 800.000
Pemuteran	355	Rp. 1.300.000	SD/SLTP/ SLTA	Rp. 800.000	Rp. 500.000
Banyupoh	25	Rp. 2.000.000	SMP	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
Penyabangan	175	Rp. 1.500.000	SD-SMA	Rp. 1.500.000	Rp. 500.000
Musi	100	Rp. 1.500.000	SD/SLTP/ SLTA	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Sanggalangit	60	Rp. 1.500.000	SD/ SEDERAJAT	Rp. 1.100.000	Rp. 400.000
Gerokgak	26	Rp. 1.500.000	SMU	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
Patas	260	Rp. 1.200.000	SD/ SEDERAJAT	Rp. 700.000	Rp. 500.000
Pengulon	30	Rp. 1.500.000	SD/SMP/SMP /SMA/S1	Rp. 1.500.000	Rp. 500.000
Celukan Bawang	203	Rp. 1.500.000	SD/ SEDERAJAT	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000

Sumber : Desa di Kecamatan Gerokgak

Berdasarkan data yang dihimpun, kondisi sosial dan ekonomi keluarga nelayan di wilayah ini menunjukkan keragaman yang cukup mencolok. Jumlah nelayan per desa tercatat bervariasi, rata-rata pendapatan keluarga nelayan juga tidak merata antara Rp1.200.000 sampai Rp2.000.000 per bulannya. Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan mayoritas keluarga nelayan berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Buleleng tahun 2025 yaitu sebesar Rp2.996.561. Jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh keluarga sangat

berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dalam keluarga, dengan memiliki jumlah pendapatan yang cenderung tinggi akan meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga (Sutrisna & Dharmayasa, 2025).

Tingkat pendidikan keluarga nelayan sebagian besar masih berada pada jenjang SD atau sederajat, yang berpengaruh terhadap kualitas hidup dan akses terhadap peluang ekonomi. Di sisi lain, akses layanan kesehatan, kondisi rumah, dan kepemilikan rumah belum sepenuhnya merata. Misalnya, masih ada desa yang persentase kepemilikan dan kondisi umum rumah belum sepenuhnya layak. Selain itu, pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pangan dan non-pangan cukup tinggi, yang bisa menjadi beban tambahan bagi keluarga nelayan dengan pendapatan terbatas.

Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan masih bekerja pada tingkat ekonomi yang rendah, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak. Nelayan termasuk dalam kelompok masyarakat rentan karena pendapatan yang tidak menentu dan sangat bergantung pada kondisi alam. Pendapatan sangat berpengaruh pada keamanan mata pencaharian (Ramdayanti dkk., 2021). Sumber daya laut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kehidupan nelayan dan mengurangi kemiskinan, tetapi pendapatan mereka masih di bawah upah minimum (UMK).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan tidak hanya dapat dilakukan dari sisi produksi hasil tangkapan, tetapi juga melalui penguatan faktor-faktor sosial dan kelembagaan. Faktor yang memberikan perubahan terhadap PDRB dan kesejahteraan diantaranya yaitu peran pemerintah dan modal sosial (Laksmi & Arjawa, 2023). Menurut Wisudayana dkk. (2018), Terdapat sejumlah faktor yang

memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, di antaranya peran pemerintah dan modal sosial. KKP pemerintah telah menerapkan berbagai program yang secara sistematis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Nurhasanah & Jalal, 2021). Masyarakat terkait erat dengan modal sosial. Pengembangan modal sosial dimungkinkan oleh kohesi sosial yang kuat di mana individu tergabung dalam berbagai kelompok sosial (Puspitasari, 2024).

Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pembangunan masyarakat pesisir melalui kebijakan, bantuan sarana dan prasarana, serta program pemberdayaan (Laksmi & Arjawa, 2023). Negara memainkan peran penting dalam mengarahkan pembangunan ekonomi, mereka dapat mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui tindakan dan inisiatif politik yang tepat (Gai dkk., 2024). Dengan demikian, kuat atau lemahnya peran pemerintah yang ada akan berdampak langsung terhadap keberhasilan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian Rostin (2016) menyatakan bahwa peningkatan kondisi ekonomi nelayan dapat diwujudkan melalui perluasan akses masyarakat terhadap berbagai lembaga ekonomi. Selain itu, optimalisasi peran kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah serta penguatan hubungan antara lembaga informal dan formal juga perlu dilakukan. Program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bagi masyarakat pesisir bertujuan untuk mendorong peningkatan kondisi ekonomi masyarakat (Utami dkk., 2019).

Peran pemerintah merupakan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup warga (Saufiah dkk., 2024). Firdaus (2020)

menyatakan bahwa peran pemerintah diwujudkan melalui kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Peran tersebut tercermin melalui fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di Kecamatan Gerokgak, peran pemerintah terlihat melalui pemberian bantuan perahu, mesin perahu, alat tangkap, bantuan sosial seperti BPJS/KIS dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta dukungan pengembangan usaha perikanan, tetapi pelaksanaannya belum merata.

Selain itu, modal sosial menjadi faktor dalam mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan. Institusi sosial yaitu jaringan, norma, serta kepercayaan sosial mendorong kerja sama sosial untuk kebaikan bersama dikenal sebagai modal sosial (Hanum dkk., 2016). Modal sosial tidak hanya sekadar kumpulan elemen penting dalam interaksi sosial, tetapi juga mencakup komponen-komponen yang harus memberikan dampak positif. Pengembangan elemen-elemen modal sosial di masyarakat menjadi bagian yang penting. Berbagai unsur yang menyusunnya dalam kehidupan sosial berfungsi sebagai titik kunci dalam beragam aktivitas interaksi, baik di dalam masyarakat, asosiasi, maupun kelompok lainnya. Individu maupun komunitas memiliki peran yang sangat penting. Keduanya memiliki posisi yang setara, sehingga saling membentuk dan bergantung satu sama lain, karena modal sosial mempengaruhi cara orang dapat berkolaborasi dengan mudah (Amir & Haeruddin, 2024).

Modal sosial sebagai aset nonfisik berupa norma, jaringan sosial, dan kepercayaan memiliki peran penting dalam mendorong kerja sama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Modal sosial masyarakat nelayan di

Kecamatan Gerokgak terlihat melalui hubungan antar nelayan yang saling membantu dalam aktivitas melaut, memberikan informasi tentang lokasi penangkapan ikan dan adanya kepercayaan dalam kerjasama kelompok. Namun, kekuatan modal sosial di masyarakat nelayan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat nelayan yang bekerja secara individual dan memiliki keterbatasan jaringan sosial, sehingga kurang mampu mengakses informasi dan peluang ekonomi.

Seperti yang ditunjukkan di atas, banyak faktor yang terus memengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Gerokgak, termasuk peran pemerintah dan modal sosial. Akibatnya, penulis memutuskan untuk menulis penelitian dengan judul "Pengaruh Peran Pemerintah dan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Gerokgak."

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah dapat diidentifikasi berdasarkan informasi latar belakang yang disajikan di Kecamatan Gerokgak yaitu sebagai berikut.

1. Potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Gerokgak seperti sumber daya kelautan dan perikanan yang potensinya cukup besar, belum dimanfaatkan dengan benar. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
2. Pendapatan nelayan masih tergolong pendapatan yang rendah serta tidak stabil karena sangat bergantung pada kondisi alamnya, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan dan masih tingginya tingkat kemiskinan di kalangan nelayan.

3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan masih terbatas, ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi yang mempengaruhi kemampuan dalam meningkatkan pendapatan.
4. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pemberian bantuan perahu, mesin perahu, alat tangkap, bantuan sosial seperti BPJS/KIS dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta program pemberdayaan dan pengembangan usaha perikanan telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan optimal.
5. Modal sosial masyarakat nelayan melalui kerja sama antar nelayan, saling membantu dalam aktivitas melaut, memberikan informasi tentang lokasi penangkapan ikan dan kepercayaan dalam kerjasama kelompok telah terbentuk, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dan tidak memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Pembatas Masalah

Pada pembatas masalah, penelitian ini agar lebih terarah, terfokus, hingga tidak meluas, maka permasalahan penelitian ini dibatasi variabelnya. Dengan demikian, penulis membatasi variabel penelitian dengan memfokuskan pada peran pemerintah, modal sosial dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, topik utama berikut akan dibahas.

1. Bagaimana pengaruh peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Gerokgak?
2. Bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Gerokgak?
3. Bagaimana pengaruh peran pemerintah dan modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Gerokgak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut.

1. Untuk menguji pengaruh peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Gerokgak.
2. Untuk menguji pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Gerokgak.
3. Untuk menguji pengaruh peran pemerintah dan modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Gerokgak.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, temuan penelitian ini menawarkan manfaat berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan dan memperdalam pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan terkait peran pemerintah, modal sosial dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

2. Manfaat Praktis

Pertama, para peneliti diharapkan menerapkan keahlian mereka pada kondisi aktual di lapangan. Kedua, hasil studi ini dimaksudkan untuk menjadi bahan referensi dan bacaan untuk siswa dan orang lain yang tertarik di Universitas Pedagogi Ganesha, untuk memperluas pengetahuan mereka.

